

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Implementasi cita-cita Indonesia tercantum pada UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dengan melakukan infrastruktur tingkat daerah yang termasuk pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan dalam pembangunan suatu daerah yaitu mampu mengoptimalkan potensi daerahnya sendiri bersama dengan masyarakat serta meningkatkan perkembangan di sektor ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut Indonesia sejak 1 Januari 2001 telah memberlakukan kebijakan otonomi daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kebijakan desentralisasi sebagai kelanjutan kebijakan otonomi, suatu daerah mendapatkan kewenangan dalam memperoleh sumber PAD untuk membiayai kebutuhan daerah selain dari transfer dana pemerintah pusat (Anggoro & Muttaqin, 2019).

Implementasi otonomi daerah berpedoman pada asas desentralisasi dengan bentuk otonomi yang luas, nyata serta bertanggung jawab. Tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal salah satunya guna meningkatkan kemandirian daerah dan meminimalisir ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat (Elwan, 2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi

juga kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Untuk mengoptimalkan implementasi otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, pemerintahan daerah melakukan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU Pasal 33 Tahun 2004, “Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.”

Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembangunan dan kemandirian daerah, Kabupaten Tegal sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah melakukan eksplorasi sumber dana lain dari dalam wilayah. Satu diantaranya ialah dengan cara meningkatkan penerimaan pajak daerah berupa pajak hotel dan pajak restoran. Secara geografis Kabupaten Tegal terletak di persilangan daerah Jakarta – Purwokerto dan Semarang – Cirebon – Jakarta, yang menjadi jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa sehingga Kabupaten Tegal memiliki potensi obyek wisata seperti pantai, waduk, wisata pegunungan serta kuliner yang beragam dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Kabupaten Tegal untuk berkunjung. Dalam kurun lima tahun, hotel dan restoran di Kabupaten Tegal mengalami penambahan kuantitas. Bertambahnya jumlah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran
2016	40	32
2017	31	63
2018	44	68
2019	47	76
2020	44	82

Sumber: DISPORPAR Jawa Tengah

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 tersaji banyaknya hotel dan restoran di Kabupaten Tegal pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2020 jumlah hotel mengalami penurunan dari 47 hotel menjadi 44 hotel dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih berkejang yang memberikan dampak signifikan ke sektor jasa pariwisata yang mengakibatkan omset bidang usaha penginapan turun drastis sehingga terdapat hotel yang harus tutup karena tidak sanggup bertahan.

Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan PAD tahun 2020 terhitung dari bulan Januari sampai Juni mencapai 2,12% yang seharusnya PAD telah terealisasi minimal 50% dari target yang ditetapkan. Target PAD tahun 2020 adalah Rp 450 miliar dan sampai bulan Juni PAD yang terealisasi Rp 215,8 miliar atau 47,88%. Total realisasi PAD selama tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 PAD terealisasi mencapai Rp 438,2 miliar sedangkan realisasi PAD tahun 2020 hanya mencapai Rp 437,3 miliar. Penurunan PAD disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi. Pembatasan aktivitas masyarakat seperti pengurangan kapasitas pengunjung juga memberikan dampak yang signifikan terutama pada penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran.

Tabel 1.2 menyajikan perkembangan realisasi PAD, pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal tahun 2016-2020.

Tabel 1.2  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Restoran (Rp)
2016	324.576.060.329	69.810.605.561	376.063.397	1.933.911.392
2017	373.864.128.676	97.179.813.749	447.178.254	2.621.114.069
2018	368.423.418.187	106.862.363.394	610.644.058	5.227.014.126
2019	438.277.936.166	122.789.736.901	603.842.624	6.792.691.413
2020	437.357.317.115	125.228.966.875	422.893.771	4.665.435.647

Sumber: BP2D Kabupaten Tegal

Menurut Bupati Tegal Umi Azizah, pembukaan operasional obyek wisata dan pelonggaran aktivitas masyarakat secara bertahap diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD terutama pada sektor jasa dan pariwisata ([kumparan.com](http://kumparan.com)). Peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan PAD dari pajak daerah, terutama penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun ke tahun tidak cukup dijadikan patokan untuk mengukur keberhasilan dalam memungut pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Menurut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Edi Budiyanto untuk meningkatkan PAD dari pajak daerah, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya dalam berinovasi, melakukan terobosan dan menerapkan kerja kreatif di masa pandemi, seperti penggunaan teknologi informasi, teknologi finansial yang memudahkan para wajib pajak dan objek retribusi membayar kewajibannya, menjadikan lebih dekat pada akses pembayaran pajak ([jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com)).

Dengan menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kontribusi pajak hotel dan pajak restoran diharapkan bisa membantu mengoptimalkan pemerintah daerah dalam menentukan kesuksesan pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap PAD di Kabupaten Tegal. Analisis rasio efektivitas dilakukan guna menunjukkan keberhasilan tujuan yang akan dicapai, analisis rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur serta membandingkan keluaran yang dihasilkan dan masukan yang digunakan serta analisis rasio kontribusi bertujuan mengetahui seberapa besar sumbangan pajak hotel dan pajak restoran dalam penerimaan PAD (Moridu, 2017). Penelitian ini juga akan menjelaskan langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal meningkatkan PAD melalui sektor pajak hotel dan pajak restoran. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2016 - 2020”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah mengukur rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kontribusi pada pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana efektivitas, efisiensi dan kontribusi pada pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Tegal tahun 2016 – 2020 serta bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan PAD melalui pajak hotel dan pajak restoran?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah menganalisis rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal pada tahun 2016-2020 serta mengetahui langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak hotel dan pajak restoran.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak daerah, khususnya mengenai pajak hotel dan pajak restoran. Serta dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan bahan evaluasi terkait kebijakan keuangan daerah di masa mendatang dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal melalui pajak hotel dan pajak restoran.